

## SEMINAR EDUKASI TATA CARA PERSIDANGAN DI PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

**Muhammad Mahesa Asykari Muzon, Kadek Julia Mahadewi**

Universitas Pendidikan Nasional

*mahezmuzon14@gmail.com, juliamahadewi@undiknas.ac.id*

### Abstract

This statement is aiming to understand the procedures of military trials in Indonesia. The Military Court is the one who execute the judicial power within the Armed Forces to uphold law and justice by paying attention to the interests of the organizers of state defence and security. The National Indonesian Armed Forces or known as TNI soldiers are Indonesian citizens who meet the specification of the requirements in the legislation and are appointed by authorized officials to serve in the military service, which in the general sense of the Indonesian Armed Forces consists of the Army, Navy, and the Air Force.

*Keywords: military justice, Military.*

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memahami tata cara persidangan militer di Indonesia. Peradilan militer adalah orang yang memiliki kekuasaan dilingkungan Angkatan yang bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan penyelenggaraan keamanan dan pertahanan negara. Tentara Nasional Indonesia atau TNI merupakan warnaga negara Indonesia yang resmi diangkat atau memenuhi persyaratan undang undang untuk mempertahankan negara.

*Kata kunci: Peradilan Militer, Kemiliteran.*

### PENDAHULUAN

Militer mempunyai arti seseorang yang bersenjata dan biasanya di siapkan untuk peperangan untuk menjaga keamanan negara ,diangkat dari Bahasa Yunani yaitu *miles* yang dipersenjatai dan (Sianturi,1985).Pengadilan Militer merupakan tempat yang melakukan persidangan atau peradilan terhadap anggota militer,Pengadilan Tinggi Militer dan pengadilan militer pertempuran. Biasanya pengadilan militer ditetapkan dengan keputusan dari panglima.Panglima tersebut panglima TNI/Kapolri. Dalam pengadilan militer terdapat satu hakim ketua,dua orang hakim anggota,dihadiri juga oleh oditur militer,dan di bantu

satu orang panitera. Pengadilan Militer ini masi di bawah naungan MA atau Mahkamah Agun yang masih melaksanakan mengenai kekuasaan kehakiman tindak kejahatan dalam Peradilan Militer.

Di dalam Kedudukannya peradilan militer dibawah kekuasaan kehakiman dari mabes TNI, oleh karena itu dapat dikatakan satu poin penting memindahkan babinkum dan organisasi peradilan militer dibawah kekuasaan kehakiman departemen pertahanan dan mempertegas kedudukan militer ditingkat kasasi dalam Mahkamah Agung, dengan demikian seluruh hakim di Mahkamah Agung termasuk hakim agung militer merupakan pekerja sipil.

Setiap pekerjaan pasti terdapat standar operasional atau SOP dalam Pengadilan Militer juga memiliki SOP tersendiri. Biasanya yang membedakan itu dari segi admistrasinya yang di bagi menjadi dua, yaitu admistrasi perkara pidana dan administrasi umum. pada hakikatnya pengadilan militer di Indonesia dibangun pada 1948 dengan dasar UU NO.7 tahun 1946 yang berbunyi mengadakan pengadilan tantara di samping pengadilan biasa.

Perkembangan zaman semakin maju, pesatnya teknologi yang masuk ke Indonesia juga memengaruhi sistem persidangan yang berlangsung. Contohnya yang dapat dilihat dari Pengadilan Milite atau PM di beberapa daerah yang biasanya melakukan sidang dengan 2 tipe yaitu sidang secara langsung dan sidang online, maka dari itu juga perkembangan teknologi ini juga mempermudah untuk mendaftarkan sidangnya dan tidak membuang waktu, Selain itu juga bisa mempermudah pelapor untuk mendapatkan informasi dari jarak jauh. Hal tersebut sangat bermanfaat sekali bagi perkembangan persidangan, pasalnya orang yang ingin membuat catatan sidang di PM (Pengadilan Militer) tidak perlu datang langsung ke tempat pengadilan tersebut dan bisa melakukannya hanya dari ponsel saja.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Seminar Edukasi ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional pada bulan Juni 2023 yang bertempat pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan harapan persidangan kedepannya memenuhi SOP (Standar Operasional dan Prosedur) Pengadilan Militer RI.

#### **Hasil**

Standar operasional dan prosedur pengajuan perkara banding pengadilan militer biasanya dilakukan oleh panitera untuk melakukan pengajuan surat permohonan banding dalam tenggang waktu 7 hari, lalu bagi orang yang terlibat atau orang yang bersalah dalam tenggang waktu pada hari itu juga atau dalam tenggang waktu berikutnya.



**Gambar 1.1** foto bersama di PM III-14 Denpasar

#### **Tindak Pidana Militer:**

##### **1. Tindak Pidana Militer Murni (*zuiver militaire delict*)**

Tindakan seorang militer yang tanpa sengaja atau melakukan misi khusus namun terlarang. Biasanya dilakukan karena keadaan terdesak atau kepentingan militer yang harus melakukan tugas tersebut. Contohnya seperti meninggalkan pos penjagaan, kejahatan desersi, atau dalam suatu perang dengan sengaja atau tidak menyerahkan sebagian maupun penuh sebuah pos yang di perkuat oleh musuh tanpa ada usaha mempertahankannya

##### **2. Tindak Pidana Militer Campuran (*gemengde militaire delict*)**

Tindakan yang memang disengaja dilakukan dan memiliki dasar hukum yaitu menggunakan system perundang undangan yang tertulis pada

kitab undang undang hukum militer atau KUHPM sehingga sanksi lebih berat. Contohnya seorang anggota yang memiliki senjata seharusnya menjaga keamanan, namun menggunakan senjatanya untuk melukai orang sekitar atau memberontak.



Gambar 1.2 mengikuti sidang di PM III -14 Denpasar

### Tingkat Peradilan Militer Bagi Anggota

Tingkat peradilan militer bagi anggota dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu;

1. Tingkatan pertama adalah pengadilan militer yang biasanya memeriksa dan memutus tindak pidana. Pada tahap ini yang di adili merupakan atau memiliki pangkat kapten kebawah.
2. Tingkat kedua pengadilan militer tinggi dalam tingkat kedua ini terdakwa yang di adili atau yang di priksa merupakan pangkat mayor
3. keatas dan biasanya memutuskan untuk mengajukan Tindakan banding pada pengadilan militer.
4. Tingkat ketiga pengadilan militer utama dalam tingkat ini memiliki wewenang untuk memutuskan tingkat pertama

pengadilan militer yang mengajukan banding.

### Keputusan Hakim

Dalam sebuah pengadilan pasti terdapat hakim, Hakim adalah orang yang berwenang memberikan keputusan. Jadi keputusan hakim inilah yang merupakan sebuah hukuman bagi orang yang berselisih. Putusan hakim sebenarnya tidak semudah itu untuk di berikan kepada pihak yang berselisih namun hakim juga harus mempelajari kasus tersebut karena sebuah keputusan dari hakim, jika salah Tindakan maka akan berdampak juga kepada sistem peradilan di Indonesia.

### Tata Usaha PM atau Pengadilan Militer

Selain ada tata cara persidangan di Pengadilan Militer juga terdapat Tata Usaha Militer. Tata usaha militer juga sama fungsinya dengan persidangan biasanya namun bedanya tata usaha persidangan militer ini mengadili orang yang bersengketa yang muncul karena tidak terima dengan keputusan dari bidang hukum perdata. Dari banyaknya tuntutan dan permintaan pemajuan HAM dalam aspek pertahanan dan keamanan maka dibagunlah Tata Usaha Pengadilan Militer ini yang sangat penting bagi kemajuan hak asasi dalam Pengadilan Militer atau PM. Kelemahan tata usaha militer ini adalah dia tidak bisa mengadili Prajurit Tama atau Bintara Tamtama, Tata usaha ini hanya bisa mengadili tingkat banding saja.

Faktor penghambat perkembangan tata usaha ini adalah dari pemerintahan itu sendiri karena takut mengganggu sistem peradilan yang sudah tertata dan menggagu hierarki.

### Implementasi Ecourt

Aplikasi E Court? Nahh jadi aplikasi E Court itu adalah sebuah

aplikasi yang biasanya di gunakan pada sebuah persidangan untuk mendaftarkan perkara secara online,melakukan pembayaran secara online,mendapat informasi tentang persidangan yang sudah di daftarkan secara online,dan juga sidang secara online loh.



Gambar 1.3 Tampilan E Court

Cara mendaftar di aplikasi ini juga terbilang sangat mudah karena hanya tinggal registrasi,lalu pilih tempat pengadilan yang dituju,lalu kita akan mendapat nomer registrasi perkara pidana dan Langkah terakhir hanya perlu mengupload berkas melalui gambar atau pdf. Jadi aplikasi tersebut adalah aplikasi yang sudah resmi dari Mahkamah Agung atau MA pada tahun 2018.

## KESIMPULAN

Pada era digital ini kita sebagai rakyat Indonesia yang pada dasarnya merupakan negara hukum haruslah tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi membuat Indonesia maju. Dalam suatu negara memang bisa terjadi perpecahan,namun mari kita atasi semua masalah itu dengan Bersatu.

Peradilan militer merupakan tempat pengadilan yang di khususkan bagi para amggota kepemiliteran yang masih dalam naungan Mahkamah Agung atau MA yang memiliki undang undang tersendiri dan wajib hukumnya

untuk ada di sampng pengadilan biasa . Dikatakan satu poin penting memindahkan babinkum dan organisasi peradilan militer dibawah kekuasaan kehakiman departemen pertahanan dan mempertegas kedudukan militer ditingkat kasasi dalam Mahkamah Agung, dengan demikian seluruh hakim di Mahkamah Agung termasuk hakim agung militer merupakan pekerja sipil.

## DAFTAR PUSTAKA

- n.d. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang pengadilan militer*
- E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi,SH,. 1981. "hukum pidana militer di indonesia." hlm 308. jakarta.
- Heniarti, Dini Dewi. 2017. "sistem peradilan militer di indonesia ." hlm 63.
- prasetya, agung. 2021. *implementasi e court dalam perfektip penanganan perkara pidana.* Accessed juni 27 , 2023.
- Syahrani, Riduan. 1988. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* Hlm83.
- n.d. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang.*